

ABSTRAK

Penanaman modal atau investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan (*natural person*) atau badan hukum (*yuridis person*) untuk menambah atau mempertahankan modalnya, yang berupa uang tunai (*cash money*), peralatan, harta tak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan keahlian. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu; bagaimana pelaksanaan pemberian insentif bantuan modal kepada usaha mikro di bidang kerajinan anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi dan juga apa saja permasalahan yang menghambat pelaksanaan pemberian insentif terhadap usaha mikro di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta (*Fact Approach*). Hasil dari penelitian pelaksanaan pemberian insentif untuk penyelenggaraan penanaman modal pada usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi bahwa Pemkab Banyuwangi belum melaksanakan pemberian insentif bantuan permodalan kepada usaha mikro di bidang anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi. Alasan yang menghambat pelaksanaan pemberian dana insentif bantuan modal kepada Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi yakni karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur teknis pelaksanaan pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi sehingga menyebabkan usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi terhambat dan tidak berjalan secara optimal.

Kata Kunci: penanaman modal, dana insentif, usaha mikro, pelaku usaha

ABSTRACT

Investment or investment is an activity carried out by an individual (natural person) or legal entity (juridical person) to increase or maintain capital, in the form of cash (cash money), equipment, immovable property, intellectual property rights, and expertise. This research focuses on two problems, namely; How is the implementation of providing capital assistance incentives to micro businesses in the field of plastic woven crafts in Banyuwangi Regency and also what are the problems that hinder the implementation of providing incentives to micro businesses in Sumenep Regency. This research method uses empirical legal research using legislation and a fact approach. The results of the research on the implementation of incentives for the implementation of investment in micro-enterprises in Banyuwangi Regency that the Banyuwangi Regency Government has not implemented the provision of capital assistance incentives to micro-enterprises in the field of plastic weaving in Banyuwangi Regency as stated in Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Providing Incentives and Implementation Investment in Banyuwangi Regency. The reason that hinders the implementation of the provision of capital assistance incentive funds to Micro Enterprises in Banyuwangi Regency is the absence of laws and regulations that clearly regulate the technical implementation of providing incentives and investment facilities for business actors in Banyuwangi Regency, causing micro-enterprises in Banyuwangi Regency to be hampered and not running optimally.

Keywords: investment, incentive funds, micro-enterprises, business actors

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penelitian Terdahulu.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	12
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH	18
2.1 Tinjauan Umum Penanaman Modal.....	18
2.1.1 Pengertian Penanaman Modal.....	18

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal	20
2.1.3 Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Penanaman Modal	23
2.1.4 Pengertian Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal	28
2.1.5 Kebijakan Dasar Penanaman Modal	30
2.1.6 Penyelenggaraan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah	31
2.2 Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	35
2.2.1 Pengertian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	35
2.2.2 Asas dan Prinsip Pemberian Insentif Penanaman Modal.....	36
2.2.3 Kriteria dan Bentuk Pemberian Insentif Penanaman Modal.....	37
2.3 Tinjauan Umum Usaha Mikro.....	41
2.3.1 Pengertian, Asas dan Tujuan Usaha Mikro.....	41
2.3.2 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro.....	43
2.3.3 Kriteria Usaha Mikro	44
BAB III.....	45
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL TERHADAP USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL	45
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....	45
3.1.1 Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi	45
3.1.2 Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi.....	51
3.1.3 Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi	53
3.2 Pelaksanaan Pemberian Insentif Untuk penyelenggaraan Penanaman Modal Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Banyuwangi.....	55
3.2.1 Pelaksanaan Pemberian Insentif sesuai Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal.....	55
3.2.2 Pelaksanaan Pemberian Insentif Untuk Penyelenggaraan Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...	73
3.3 Permasalahan Yang menghambat Pelaksanaan Pemberian Insentif Pada Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi.....	77
BAB IV	85

PENUTUP.....	85
4.1 Simpulan	85
4.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	93